

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. Tri Anggraini. 2017. *Rule of Reason dan Per Se Illegal dalam Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: UII Press.
- Andi Akram. *Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*.
- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Andi Fahmi Lubis, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Edisi Kedua. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Cecep Tatang Risman, Wiryanto, dan Sultan. 2023. *Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*.
- Dyah Ochtorina Susanti, et al. 2022. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eny Budi Sri Haryani. 2023. *Pembuktian Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Jerry Haikal, dkk. 2022. *Manajemen Persaingan Usaha Bidang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeaan (PPJK) Bea Cukai Soekarno Hatta*. Jakarta: Universitas Bakrie.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 2016. *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: KPPU.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2021. *Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Siddiq Armia. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Oti Handayani. 2019. *Diktat Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa*

- Pemerintah Level 1: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Putra, I Putu Rasmadi Arsha. 2015. *Persekongkolan Dalam Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Laporan Penelitian. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirait, Andre Edoardo. 2024. *Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Tentang Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Tiga Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*. Skripsi. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solikin, H. Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Qiara Media.
- Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tami Rusli. 2021. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Wulandari, Sinar Ayu, Mas Rahmah, dan Liliek Pudjiastuti. 2002. *Hukum Persaingan Usaha dalam Kaitannya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional*. Laporan Penelitian DIK Suplemen Universitas Airlangga. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Akhmad Ikraam, Aisyah Ghanniyyah Inas, dan Ibnu Rizqi Suwondo. 2025. *Membedah Kasus Persekongkolan Tender PT Adhikarya & PT Kalber Berdasarkan Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia. Volume 10, Nomor 01.
- Arifa Puspa Maulidya, Budi Santoso, dan Budiharto. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Praktik Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan (Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2017)*. Diponegoro Law Journal. Volume 8, Nomor 4.
- Arifin, Zaenal, Muhammad Amirullah, dan Tri Nugroho. 2024. *Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi*. Jurnal USM Law Review. Vol 7 No 2. Universitas Semarang. Semarang.
- Dapurahayu, Sella, Sri Adisty Jauharah, Dendy Suma Pratama, Annisa Fitriani, dan Farahdinny Siswajanthry. 2025. *Perbandingan Efektivitas Sanksi Administratif Dan Pidana Terhadap Pelaku Kartel Di Indonesia*. Indonesian

- Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3 No. 1. Universitas Pakuan, Bogor.
- Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8, Nomor 1.
- Dzaky Ismail Al Abyan. 2023. *Analisis Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender Kasus Pengadaan Palapa Ring Mataram Kupang Cable System PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk*. "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Volume 2.
- Eka Putri Fauzia Ikromi, Zahry Vandawati Chumida, dan Sinar Aju Wulandari. 2023. *Persekongkolan Tender Non Sub Kontrak dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. Volume 17, Nomor 2.
- Erwin Suryoprayogo. 2022. *Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender*. LEX Renaissance. Volume 7, Nomor 1.
- Ferdinand, Adam Khafi, Sunarto DM, dan Maya Shafira. 2020. *Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Cepalo, Vol. 4 No. 2. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Hasbullah, M. Afif. 2021. *Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Education and development. Vol. 9 No. 4. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan.
- Muhammad Iqbal, Misnar Syam, dan Yasniwati. 2025. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Terjadinya Persekongkolan Tender*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Volume 7, Nomor 3.
- Munawir, Zaini, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Harahap. 2025. *Aspek Hukum Pidana Dalam Persaingan Usaha Pasca UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Serta Perpres Nomor 100 Tahun 2024 tentang KPPU*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 12 No. 1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Nurul Fitriani. 2021. *Wewenang KPPU terhadap Pemberian Sanksi pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume 21, Nomor 1.
- Panjaitan, Esther Putri Lasmaida. 2021. *Larangan Persekongkolan Tender: Studi Perbandingan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Antitrust Law di Amerika Serikat*. Prodigy: Jurnal Perundang-undangan, Vol. 9 No. 2. Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- R. Rahmat Dannur dan Mispansyah. 2025. *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang Tidak Berwenang Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Perspektif Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Kolaboratif Sains. Volume 8, Nomor 6.

- Resmaya Agnesia Mutiara Sirait. 2020. *Larangan Tindakan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Tanjungpura Law Journal. Volume 4, Nomor 2.
- Rinjani Ayu Tri Rahmawati, et al. 2025. *Tinjauan Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2020 tentang Persekongkolan Tender Berdasarkan UU No.5/1999*. Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum.
- Sigit Wibowo. 2022. *Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik pada Pekerjaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020)*. Jurnal Hukum Caraka Justitia. Volume 2, Nomor 1.
- Surahman, et al. 2025. *Analisis Yuridis Dugaan Persekongkolan Tender Pembangunan Ma'had Al Jamiah II, Samarinda Tahun 2011 (Studi Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2012)*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Volume 5, Nomor 2.
- Tara Damayanti dan Sharda Abrianti. 2022. *Tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa Sum-Ut Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. Reformasi Hukum Trisakti. Volume 4, Nomor 3.
- Tsaliza Soraya Majid dan N.G.N Renti Maharaini. 2023. *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender (Studi Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-I/2019)*. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti. Volume 5, Nomor 4.
- Veri Antoni. 2019. *Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia*. MIMBAR HUKUM. Volume 31, Nomor 1.
- Vita Mahardhika. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 16, Nomor 1.
- Yelly Metasari. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Hukum Sasana. Volume 8, Nomor 1.
- Yulius Efendi dan Teguh Wicaksono. 2025. *Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum. Volume 2, Nomor 1.
- Zihaningrum, Apectriyas dan Munawar Kholil. 2016. *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Privat Law. Vol. IV No. 1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Abdul Hafiz Rangkuti. 2022. *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/KKPU.1/2018)*. Skripsi. Universitas Medan Area, Medan.
- Fahriza, Muhammad Gusmar. 2024. *Potensi Pengaturan Leniency Program Sebagai Penegakkan Hukum Terhadap Kartel Di Indonesia (Perbandingan*

- Leniency Program di Jepang*). Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fanny Kusuma Yudha. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Merugikan Negara (Perkara Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi)*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
- Omar Mardhi. 2011. *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Panitia Tender dalam Kasus-Kasus Persekongkolan Tender di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rezha Nurachmady. 2005. *Persekongkolan Tender Pengadaan Pipa Casing dan Tubing PT. Caltex Pacific Indonesia*. Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Y Budiarto Monareh. 2011. *Masalah Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha- Studi Kasus Putusan KPPU No.35/KPPU-1/2010 Dalam Proyek Donggi Senoro*. Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Hukum Lainnya

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2010. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Wawancara

- Wawancara dengan Mansur, Investigator Utama Madya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada Tanggal 4 September 2025.